

## ABSTRAK

Perjalanan notaris Indonesia mengalami beberapa perkembangan sesuai dengan perkembangan Negara dan bangsa Indonesia. Sejarah kontemporer Indonesia mencatat bahwa pada era reformasi terjadi perubahan lembaga notariat yang cukup signifikan. Perubahan tersebut ditandai dengan berhasilnya pemerintah orde Reformasi mengundang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). UUJN merupakan pengganti Peraturan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: tinjauan yuridis pelaksanaan proses penyelesaian pelanggaran kode etik notaris di Kota Kendari dan hambatan dan solusi proses pelaksanaan penyelesaian pelanggaran kode etik notaris di Kota Kendari. Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis empiris dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara dengan Dewan Kehormatan dan Notaris di Kota Kendari. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Proses Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Kota Kendari adalah sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan terhadap Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik berupa pembuatan akta notaris di luar wilayah jabatannya adalah pemberhentian sementara. Hambatan dalam proses penyelesaian pelanggaran kode etik Notaris di Kota Kendari yaitu jumlah Notaris yang sangat banyak, dengan wilayah kerja yang luas, kurangnya kesadaran Notaris untuk mentaati kode etik, dan bekal yang diperoleh Notaris tidak cukup selama mengikuti pendidikan, serta masih tumpang tindihnya ketentuan pengawasan kode etik antara Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris. Sementara itu, bagi Majelis Pengawas yaitu tidak tersedianya sekretariat yang representatif, kurangnya anggaran dana untuk melakukan pengawasan dan pembinaan secara optimal, kurangnya perhatian/kepedulian pemerintah, dan lemahnya moral/perilaku Notaris dalam menjalankan UUJN dan Kode Etik Notaris. Untuk memberikan solusi dalam proses penyelesaian pelanggaran kode etik Notaris di Kota Kendari yaitu melakukan pembinaan, pengawasan, bimbingan dan penyuluhan. Termasuk dalam memberikan sanksi yang tegas sebagai bagian dari pembinaan. Melakukan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) kepada Notaris dalam melaksanakan ketentuan Kode Etik Notaris.

**Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Penyelesaian, Pelanggaran, Kode Etik, Notaris**

## **ABSTRACT**

*The journey of Indonesian notaries underwent several developments according to the development of the State and nation of Indonesia. Contemporary history of Indonesia notes that in the reform era there was a significant change in notarial institutions. This change was marked by the success of the Reformation government enacting Law Number 30 Year 2004 concerning the Position of Notary Public (UUJN). UUJN is a substitute for regulation. The formulation of the problem in this research are: a juridical review of the implementation of the notary code of ethics violation process in Kendari City and obstacles and solutions to the process of carrying out the notary code of ethics violation in Kendari City. The method used by researchers is a juridical, empirical legal approach and the specifications in this study are descriptive analytical. The sources and types of data in this study are primary data obtained from field studies with interviews with the Honorary Board and Notary in Kendari City. And secondary data obtained from library research. Based on the results of the study that the Judicial Review of the Notary Ethics Code Violation Completion Process in Kendari City is a sanction that can be imposed by the Honorary Board against a Notary who is proven to have violated the code of ethics in the form of making a notary deed outside his office area is a temporary dismissal. Obstacles in the process of resolving Notary code of ethics in Kendari City are the number of Notaries that are very large, with a wide working area, lack of awareness of Notaries to obey the code of ethics, and provision obtained by Notaries is not enough during education, and overlapping provisions on code supervision ethics between the Honorary Board and the Notary Supervisory Board. Meanwhile, for the Supervisory Board, namely the unavailability of a representative secretariat, the lack of budget funds to conduct supervision and coaching optimally, the lack of government attention / concern, and the weak moral / notary behavior in carrying out the UUJN and the Notary Ethics Code. To provide solutions in the process of resolving violations of the Notary Code of Ethics in Kendari City, namely conducting guidance, supervision, guidance and counseling. Included in providing strict sanctions as part of guidance. Carry out rewards and punishments to the Notary in carrying out the provisions of the Notary Ethics Code*

**Keywords : Juridical Review, Settlement, Violation, Code of Ethics, Notary Public**